



TAHAP PERTAMA TERCATAT 13.365 KPM

Penerima PKH Diimbau Tak Tergantung Bantuan

YOGYA (KR) - Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial diharapkan tidak selamanya bergantung pada bantuan. Ketergantungan terhadap bantuan justru akan menyulitkan proses pemberdayaan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, berharap bantuan yang diperoleh seyogyanya mampu dikelola oleh penerima PKH untuk mewujudkan kemandirian. "Harus dipahami bahwa bantuan itu tidak selamanya akan diberikan. Penerima manfaat pun harus bisa mengelola bantuan yang diperoleh untuk pemberdayaan," imbaunya, Minggu (27/3).

Heroe mengaku, dirinya sudah meminta para pendamping PKH untuk memberikan pemahaman dan motivasi bagi penerima manfaat. Hal ini karena para pendamping memiliki peran pen-

ting dalam mengarahkan keluarga penerima manfaat yang didampinginya ketika mengelola bantuan yang diperoleh.

Dirinya menyebut, bantuan yang diberikan melalui PKH memang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga kurang mampu. Akan tetapi penerima program pun suatu saat harus bisa mandiri. "Jangan seolah-olah memelihara kemiskinan supaya tetap mendapat bantuan. Setiap penerima manfaat harus memiliki tujuan agar mandiri, lulus program PKH," harapnya.

Jumlah penerima PKH di Kota Yogya pada pencairan tahap keempat 2021 tercatat 11.129 keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian jumlahnya bertambah menjadi 13.365 KPM pada penyaluran bantuan tahap pertama 2022. Saat

ini bantuan yang sudah dicairkan mencapai 94 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, mengatakan meskipun dalam kondisi yang sulit akibat pandemi Covid-19, namun masih ada lebih dari 200 keluarga PKH yang dinyatakan mandiri pada Tahun 2021. "Artinya, keluarga penerima manfaat pun tetap berusaha untuk bangkit dan mandiri, tidak selamanya menggantungkan hidup pada dana bantuan PKH," katanya.

Ia berharap, seluruh keluarga yang masuk dalam PKH tahun ini pun bisa memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai aturan yang berlaku dan nantinya mampu mandiri menjadi lebih sejahtera. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005